



Article Informations
Corresponding Email:
Ratupermatara13@gmail.com

Received: 13/08/2025; Accepted:
10/01/2026; Published: 26/02/2026

DAMPAK KEBIJAKAN JEPANG TERHADAP RESPON KOREA SELATAN DALAM ISU COMFORT WOMEN TAHUN 2015-2025

Ratu Permata Risnandia Adha

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Isu *comfort women* merupakan permasalahan sejarah sensitif dalam hubungan Korea Selatan–Jepang. Meski telah ada upaya penyelesaian, termasuk perjanjian 2015, perbedaan persepsi antara pemerintah, publik, dan kelompok korban membuat isu ini tetap memicu ketegangan diplomatik. Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan Jepang terhadap Korea Selatan pada isu *comfort women* dengan kerangka National Role Conception Holsti. Metode yang digunakan adalah kualitatif studi kasus dengan data sekunder dari dokumen resmi, media, survei opini publik, dan literatur akademik. Hasilnya menunjukkan bahwa perjanjian 2015 memicu respons beragam: pemerintah berupaya menjaga hubungan diplomatik, namun menghadapi tekanan publik dan korban yang menilai kebijakan tidak memadai memulihkan martabat mereka. Korea Selatan memposisikan diri sebagai pembela hak asasi manusia, sehingga kebijakan yang dinilai tidak berpihak memicu resistensi politik dan sosial domestik. Isu ini berdampak pada hubungan bilateral, identitas nasional, dan legitimasi pemerintah.

Kata Kunci: Korea Selatan, Jepang, *comfort women*, kebijakan luar negeri, *National Role Conception*

Abstract

The comfort women issue is a sensitive historical dispute in South Korea–Japan relations. Despite resolution attempts, including the 2015 agreement, differing perceptions among the government, public, and victim groups keep tensions high. This study analyzes Japan’s policy impact on South Korea regarding the comfort women issue using Holsti’s National Role Conception framework. A qualitative case study method was applied, utilizing secondary data from official documents, media, public opinion surveys, and academic literature. Findings reveal that the 2015 agreement sparked mixed responses: the government sought to preserve diplomatic ties, yet faced strong pressure from the public and victims who deemed the policy insufficient to restore dignity. South Korea positions itself as a defender of human rights, making perceived neglect toward victims a trigger for domestic political and social resistance. The issue impacts bilateral relations, national identity, and government legitimacy.

Keywords: South Korea, Japan, comfort women, foreign policy, National Role Conception

1. PENDAHULUAN

Comfort Women atau *Jugun Ianfu* merupakan sistem perbudakan yang dilakukan oleh kalangan prajurit militer Jepang pada zaman Perang Dunia II. Ribuan perempuan Korea Selatan dipaksa melayani tentara Jepang selama perang, hingga meninggalkan luka sejarah yang mendalam. Korban dari *Comfort Women* ini mencakup dari berbagai negara seperti Korea Selatan, China, Filipina, Singapura hingga Indonesia. Isu *comfort women* menjadi isu yang sangat sensitif dan memberikan dampak trauma bagi para korban.¹

Isu *Comfort Women* ini menjadi salah satu penyebab ketegangan diplomatik bagi Korea Selatan dan Jepang. Jepang menganggap bahwa permasalahan *Comfort Women* ini menjadi suatu citra buruk bagi Jepang yang segera harus diselesaikan. Selain itu dari faktor eksternal, Jepang ingin memperbaiki hubungan diplomatik dengan Korea Selatan yang diharapkan dapat menjadi suatu awal dalam membangun berbagai kerja sama bagi kedua negara. Namun di sisi lain, Korea Selatan sebagai negara korban memandang bahwa penyelesaian tersebut tidak cukup mewakili nilai keadilan bagi para korban.²

Pemerintah Jepang bersikeras menyatakan bahwa masalah ini telah diselesaikan pada Perjanjian Tahun 1965 dan Tahun 2015 sebagai langkah besar untuk memperbaiki hubungan diplomatik kedua negara. Pemerintah Jepang mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan permasalahan ini setelah adanya ancaman untuk memutuskan hubungan diplomatik dari Korea Selatan. Setelah melalui berbagai negosiasi antara kedua negara, Jepang bersedia untuk menandatangani "*Agreement of Comfort Women*" pada 28 Desember 2015.³

¹ Kristi, Rinthania. "Perbedaan respon indonesia dan korea selatan dalam penyelesaian jugun ianfu terhadap jepang." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 5.2 (2016): 323-332.

² Sari, Constantya Astrid Permata, et al. "Factors affecting Japan in resolving the issue of jugun ianfu with South Korea through a 'finally and irreversibly' agreement between Japan and South Korea in 2016." *Strategi Perang Semester* 8.1 (2022): 57-68.

³ Fauzia, Rizka, and Saiman Pakpahan. *Diplomasi Korea Selatan Mendesak Jepang Menandatangani Agreement on Comfort Women Tahun 2011-2015*. Diss. Riau University, 2017.

Perjanjian 2015 ini mencakup beberapa kesepakatan yakni 1) Permintaan maaf dari Pemerintah Jepang terhadap para korban melalui Perdana Menteri Shinzo Abe; 2) Pemerintah Jepang memberikan kompensasi finansial kepada para korban sebesar 1 miliar yen yang digunakan untuk mendirikan Yayasan untuk rehabilitasi fisik dan psikologis serta untuk memulihkan martabat para korban *comfort women*; 3) Jaminan bahwa kedua negara telah setuju terhadap kesepakatan dan menyatakan bahwa perjanjian ini bersifat final dan tidak dapat diubah, kedua negara harus menjalankan isi perjanjian; 4) Pemerintah Jepang meminta penghapusan patung-patung *comfort women* yang didirikan di depan Kedutaan Besar Jepang di Korea Selatan.⁴

Perjanjian ini tidak dapat diterima sepenuhnya oleh Korea Selatan, terutama oleh publik Korea Selatan seperti keluarga korban dan para aktivis yang menganggap bahwa perjanjian ini tidak mengikutsertakan para korban dalam proses negosiasi.⁵ Penolakan ini ditandai dengan adanya berbagai gugatan dari para keluarga korban yang menuntut bayaran atas kompensasi. Sejak tahun 2021 hingga 2025 telah tercatat tiga gugatan yang diajukan oleh para penyintas dan keluarga korban kepada Pemerintah Jepang melalui pengadilan Korea Selatan.⁶

Pada 25 April 2025 Pengadilan Distrik Cheongju, Korea Selatan memenangkan gugatan atas ganti rugi pihak keluarga mendiang korban *Comfort Women* Gil Gap Soon, yang memerintahkan pemerintah Jepang untuk membayar kompensasi sebesar 200 juta won. Dengan adanya keputusan ini menunjukkan bahwa keluarga korban masih melakukan berbagai upaya hukum dan menuntut Jepang untuk memberikan kompensasi.⁷ Pada 2021 Pengadilan Distrik Pusat Seoul, Korea Selatan juga telah memerintahkan Jepang untuk memberikan kompensasi sebesar 100

⁴ Ibid.

⁵ Chariska, Anastasya Emmanuelle. "Dampak Penyelesaian Isu Comfort Women terhadap Diplomasi Jepang dan Korea Selatan." *Global Insights Journal*, vol. 2, no. 1, 2024, pp. 1–15. <https://doi.org/10.36859/gij.v2i1.2718>.

⁶ Ibid.

⁷ Choi, Kyong-ae. "Comfort Woman's Family Wins Suit Against Japan in S. Korea." *Yonhap News Agency*, 25 Apr. 2025, <https://en.yna.co.kr/view/AEN20250425011800320>.

juta won kepada masing-masing dari 12 korban *Comfort Women*.⁸ Pada 2023 Pengadilan Tinggi Seoul, Korea Selatan mengeluarkan putusan penting untuk membalikkan keputusan terhadap pengadilan yang sebelumnya serta memerintahkan Jepang untuk membayar kompensasi sebesar 200 juta won kepada masing-masing 16 korban *Comfort Women*.⁹

Pengadilan Korea Selatan juga telah membuat keputusan tiga kali yang menyatakan bahwa Pemerintah Jepang perlu bertanggungjawab terhadap penderitaan para korban *Comfort Women*. Dengan demikian, Permasalahan *Comfort Women* ini masih menjadi bagian penting yang sangat dihormati oleh publik dan Pemerintah Korea Selatan.¹⁰ Namun, Pemerintah Jepang memprotes keputusan tersebut dengan memanggil Duta Besar Korea Selatan dan bersikeras menganggap permasalahan ini telah selesai secara hukum dengan mengatakan bahwa keputusan tersebut melanggar Hukum Internasional dan Perjanjian Jepang-Korea Selatan.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, permasalahan *Comfort Women* ini penting untuk diteliti lebih lanjut. Mengingat bahwa seharusnya isu ini telah diselesaikan pada tahun 2015 setelah terjadinya *Agreement Of Comfort Women* oleh Korea Selatan dengan Jepang. Namun, ketegangan pada kedua negara ini masih berlanjut hingga saat ini. Masih banyak pihak yang belum menyetujui terkait perjanjian ini terutama para keluarga korban yang masih meminta gugatan terhadap Jepang. Perbedaan perspektif dan respon dari kedua negara membuat permasalahan *Comfort Women* ini berlanjut dan sulit untuk diterima kedua belah pihak. Terutama respon dari Korea Selatan yang merupakan korban dari adanya

⁸ Suzanne Nuyen. "South Korean Court Orders Japan To Compensate 12 WWII Sex Slaves." NPR, 8 Jan. 2021, <https://www.npr.org/2021/01/08/954790836/south-korean-court-orders-japan-to-compensate-12-wwii-sex-slaves>.

⁹ Shin, Hyonhee. "South Korea Court Orders Japan to Compensate 'Comfort Women', Reverses Earlier Ruling." Reuters, 23 Nov. 2023, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-korea-court-orders-japan-compensate-comfort-women-reverses-earlier-ruling-2023-11-23/>

¹⁰ "Comfort Woman's Family Wins Suit Against Japan in Korea." Korea JoongAng Daily, 26 Apr. 2025, <https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2025-04-26/national/socialAffairs/Comfort-womans-family-wins-suit-against-Japan-in-Korea/2294337>.

¹¹ "Attacks on 'Comfort Women' Heralded the Violent Far Right Seen Today in Korea, Advocate Says." The Hankyoreh, 28 Feb. 2025, https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/1184826.html.

permasalahan ini. Oleh karena itu, penulis menyusun penelitian dengan judul **“Dampak Kebijakan Jepang Terhadap Respon Korea Selatan Dalam Isu *Comfort Women* Tahun 2015-2025”**

2. PEMBAHASAN

Kebijakan Jepang dalam isu *comfort women* memberikan dampak terhadap posisi, persepsi, dan tindakan Korea Selatan dalam lingkup hubungan internasional. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori Konstruktivisme yang dikemukakan oleh Alexander Wendt dan menggunakan *National Role Conception* dari KJ. Holsti.

Dalam konteks isu *comfort women*, konstruktivisme membantu menjelaskan mengapa Korea Selatan secara konsisten menempatkan persoalan ini dalam agenda kebijakan luar negeri, meskipun secara rasional isu tersebut tidak selalu menguntungkan secara strategis atau ekonomi. Konstruktivisme menekankan bahwa identitas kolektif Korea Selatan sebagai negara demokratis yang menghormati hak asasi manusia, serta sejarah kolonial yang masih menjadi bagian dari ingatan kolektif nasional, membentuk cara pandang negara dalam merespons kebijakan Jepang.¹²

Sementara itu, konsep *National Role Conception* (NRC) dari K. J. Holsti membantu menjelaskan bagaimana negara memahami dan menjalankan peran yang ingin diemban dalam sistem internasional. Korea Selatan secara konsisten menunjukkan peran sebagai pembela keadilan historis dan pelindung HAM, termasuk dalam menanggapi kebijakan Jepang terkait *comfort women*. Peran ini dibentuk oleh pengalaman kolonial dan keinginan untuk diakui sebagai negara bermoral. Karena itu, respons tegas terhadap kebijakan Jepang merupakan bagian dari upaya Korea Selatan mempertahankan citra dan peran nasionalnya.

Dengan demikian, bab ini akan menggambarkan secara menyeluruh bagaimana isu *comfort women* tidak hanya menjadi sumber ketegangan diplomatik, tetapi juga menjadi medium bagi Korea Selatan untuk mengekspresikan nilai-nilai identitas nasional, memperjuangkan legitimasi

¹² *Ibid.*

moral di mata internasional, dan mempertahankan peran-peran tertentu dalam sistem global.

2.1. Role Performance

Dalam kerangka *National Role Conception (NRC)* yang dikembangkan oleh K.J. Holsti, *role performance* merujuk pada perilaku aktual dan kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dalam menjalankan peran internasional yang telah dikonstruksikan atau diasumsikan oleh negara tersebut. Peran ini dapat berasal dari persepsi internal negara mengenai dirinya sendiri maupun dari ekspektasi eksternal yang diberikan oleh aktor-aktor internasional lainnya. Dengan kata lain, *role performance* menggambarkan sejauh mana negara tersebut merealisasikan peran yang diembannya melalui tindakan diplomatik, pernyataan kebijakan, partisipasi dalam organisasi internasional, dan respons terhadap isu-isu global tertentu.

Role Performance bersifat dinamis dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor maupun aktor yang melingkupinya. Faktor-faktor seperti tekanan dari aktor internasional, tekanan domestik, perubahan rezim pemerintahan, dan tuntutan dari masyarakat sipil dapat membentuk atau memodifikasi bentuk dan arah dari *role performance* yang dilakukan negara. Oleh karena itu, meskipun suatu negara memiliki visi dan deklarasi peran tertentu, implementasinya dapat mengalami fluktuasi dan bahkan kontradiksi dalam praktiknya, tergantung pada konteks dan kepentingan strategis yang sedang berlangsung.

2.1.1. PEMERINTAHAN PARK GEUN-HYE (2013-2017)

Pada masa pemerintahan Park Geun Hye, isu *comfort women* menjadi salah satu fokus penting dalam hubungan diplomatik Korea Selatan dengan Jepang. Park Geun Hye secara aktif mengkritik pemerintah Jepang atas kurangnya pengakuan dan permintaan maaf yang memadai terhadap para korban. Park Geun-Hye menyampaikan bahwa mengabaikan masa lalu akan menghambat masa depan hubungan kedua negara.¹³

¹³ *Ibid.*

Park Geun Hye mempertahankan sikap keras terhadap Jepang, mengutuk usaha pemerintah Jepang pada masa Perdana Menteri Shinzo Abe yang berupaya merevisi permintaan maaf resmi yang telah diberikan Jepang sebelumnya. Ia bahkan sempat menolak untuk bertemu dengan Abe sebagai bentuk protes atas tindakan tersebut, memperlihatkan ketegangan yang cukup tajam antara Korea Selatan dan Jepang saat itu.¹⁴

Sikap Presiden Park Geun-Hye tidak lepas dari tekanan domestik, baik dari masyarakat sipil maupun media nasional. Sentimen nasionalistik di Korea Selatan pada saat itu meningkat akibat persepsi bahwa Jepang berusaha menghapus jejak sejarah kolonialnya. Selain itu, berbagai demonstrasi yang dilakukan oleh LSM dan kelompok penyintas *comfort women* setiap hari Rabu atau *Wednesday Demonstration* di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul menambah tekanan terhadap pemerintah untuk mengambil posisi yang tegas.¹⁵

Keputusan Park Geun-Hye mulai mengalami perubahan sejak tahun 2014 setelah pertemuan resmi pertamanya dengan Shinzo Abe pada KTT Nuklir 2014. Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin sepakat untuk menyelesaikan permasalahan sejarah yang sudah berlangsung lama, termasuk isu *comfort women*, dengan semangat rekonsiliasi demi masa depan hubungan bilateral.¹⁶ Pada 28 Desember 2015, Presiden Park mengajukan beberapa mosi untuk membahas kembali permasalahan *Comfort Women* dengan Perdana Menteri Shinzo Abe. *Agreement on Comfort Women* ini menjadi tonggak kontroversial dalam sejarah diplomasi antara kedua negara karena secara resmi menyatakan bahwa isu *comfort women* telah "*finally and irreversibly*."¹⁷

¹⁴ Mingzhe, Xu. "“Comfort Women”: Historical Agony and Practical Tasks." *통일인문학* 3.1 (2017): 15-30.

¹⁵ Lee, KyoungMi, and Kim, Minji. "Thousands Attend 1,400th Weekly Seoul Protest for Comfort Women." *NewsFocus: Society, Korea.net*, 14 Aug. 2019, <https://www.korea.net/NewsFocus/Society/view?articleId=174159> (Diakses pada 31 Juli 2025)

¹⁶ Snyder, Scott. "South Korean identity under park Geun-hye: Crosscurrents & choppy waters." *Joint US Korea Academic Studies* (2016): 103-112.

¹⁷ *Ibid.*

Dalam perjanjian tersebut pemerintah Jepang sepakat memberikan dana sebesar 1 miliar yen (sekitar USD 8,3 juta) kepada yayasan yang dibentuk oleh pemerintah Korea Selatan untuk mendukung para korban. Di sisi lain, Jepang meminta penghapusan patung *comfort women* atau "*statue of peace*" kepada Pemerintah Korea Selatan. Dalam pernyataan resminya, Jepang juga mengungkapkan "penyesalan mendalam" dan "permintaan maaf tulus". Pemerintah Park mempromosikan kesepakatan ini sebagai hasil diplomasi yang pragmatis dan solusi realistis terhadap isu *comfort women* yang berlarut-larut, dengan harapan dapat memperbaiki hubungan bilateral yang menegang.¹⁸

Meskipun begitu, kebijakan yang diambil Park Geun-Hye menuai kontroversi besar dan cenderung merusak upaya rekonsiliasi jangka panjang melalui tindakannya sendiri, perjanjian ini menuai kritikan dari para penyintas *comfort women* dan para aktivis. Banyak kritik yang menyatakan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam proses negosiasi, dan hasil perjanjian tersebut tidak mencerminkan kebutuhan serta aspirasi para korban. Banyak pihak yang menilai bahwa Perjanjian 2015 lebih mengutamakan kepentingan diplomatik antar negara.¹⁹

Respon dari masyarakat internasional turut meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Korea Selatan. Berbagai organisasi internasional dan lembaga-lembaga HAM lainnya menyoroti bahwa penyelesaian yang tidak melibatkan para korban secara langsung dianggap mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan transisional. Mereka menekankan pentingnya penggunaan pendekatan yang berfokus pada korban (*victim-centered approach*), di mana pemenuhan hak atas kebenaran, keadilan, dan kompensasi menjadi elemen utama dalam upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang serius.²⁰

¹⁸ Lalitya, Galuh Kinnari, and Fendy Eko Wahyudi. "Analisis Sikap yang Diambil oleh Pemerintah Korea Selatan pada Masa Presiden Park Geun Hye Terkait dengan Isu Comfort." *Journal of International Relations Diponegoro* 6.4 (2020): 639-648.

¹⁹ Ibrahim, Muhammad Pratama Putra, and Teuku Rezasyah. "Advokasi dan Negosiasi: Diplomasi Hak Asasi Manusia Republik Korea pada Masa Park Geun-hye Mengenai Comfort Women." *Padjadjaran Journal of International Relations* 3.2 (2021): 170-185.

²⁰ *Ibid.*

Terlepas dari pro dan kontra, *Agreement on Comfort Women 2015* tetap menjadi titik perhatian besar dalam hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang yang masih mengalami ketegangan hingga pemerintahan selanjutnya. Kebijakan Park Geun-Hye di isu *comfort women* menjadi landasan perdebatan panjang mengenai keseimbangan antara diplomasi dan keadilan bagi para korban dalam konteks politik era modern.²¹

2.1.2. PEMERINTAHAN MOON JAE-IN (2017-2022)

Pemerintahan Moon Jae-in mengambil pendekatan yang sangat berbeda dibandingkan pendahulunya dalam menangani isu *comfort women*. Sejak awal masa kepemimpinannya, Moon menegaskan bahwa perjanjian 2015 antara Park Geun-Hye dan Shinzo Abe tidak dapat dianggap sebagai penyelesaian final. Pada Januari 2018, Menteri Luar Negeri Kang Kyung-wha menyampaikan bahwa meskipun pemerintahan Moon tidak akan secara sepihak membatalkan perjanjian tersebut, namun kesepakatan itu “tidak menyelesaikan masalah *comfort women* secara tepat”. Pernyataan ini menjadi sinyal tegas bahwa pemerintahan Moon Jae-In lebih berpihak kepada suara para penyintas dan opini publik domestik yang sejak awal menolak kesepakatan tersebut karena dianggap tidak inklusif dan tidak memenuhi prinsip keadilan transisional.²²

Sebagai respon terhadap tekanan domestik dari kelompok aktivis dan masyarakat sipil yang menuntut keadilan bagi korban Comfort Women, Moon Jae-In mengambil langkah proaktif dengan membentuk satuan tugas khusus pada Mei 2017 untuk meninjau kembali perjanjian *Comfort Women 2015* termasuk Yayasan *Reconciliation and Healing Foundation* yang dibuat pada tahun 2015 oleh pemerintahan sebelumnya. Selama proses evaluasi, lima dari delapan direktur Yayasan yang tersisa mengundurkan diri satu hari sebelum laporan resmi hasil peninjauan dirilis pada Desember 2017. Dengan hanya tiga direktur yang tersisa,

²¹ Aryani, Ine Kusuma. "â€œComfort Womenâ€œ Korea Selatan, Karakter yang Terlupakan." *PRIMARY* 1.2 (2022): 101-123.

²² RASENDRIYA, RARA RASYKA. "KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOREA SELATAN PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN MOON JAE IN TERHADAP JEPANG DALAM KASUS COMFORT WOMEN SKRIPSI."

Yayasan *Reconciliation and Healing Foundation* tidak dapat beroperasi secara efektif.²³ Satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintahan Moon Jae-in mengidentifikasi sejumlah persoalan penting dalam elemen-elemen perjanjian yang telah diumumkan kepada publik.²⁴

Pertama, terkait pengakuan tanggung jawab, pemerintah Jepang hanya menyatakan “dengan berat hati mengakui tanggung jawabnya,” yang secara implisit merujuk pada tanggung jawab moral semata dan bukan tanggung jawab hukum. Kedua, permintaan maaf dari pemerintah Jepang tidak dituangkan dalam bentuk resolusi kabinet yang bersifat mengikat dan tidak dapat dicabut, bahkan setelah perjanjian dipublikasikan. Ketiga, dana yang disalurkan kepada Yayasan *Reconciliation and Healing Foundation* secara eksplisit dinyatakan oleh pihak Jepang bukan sebagai bentuk kompensasi berdasarkan tanggung jawab hukum. Keempat, penggunaan frasa “*final and irreversible*” dalam isi perjanjian menjadi sumber kontroversi besar di Korea Selatan karena dianggap mengabaikan dinamika emosional, historis, dan hukum yang menyertai penderitaan para korban.²⁵

Satuan tugas menyayangkan adanya berbagai pernyataan dalam perjanjian yang tidak disampaikan secara terbuka kepada publik, meskipun telah disepakati oleh kedua negara. Unsur-unsur yang bersifat tertutup ini menyangkut isu-isu yang sangat sensitif bagi masyarakat Korea Selatan. Beberapa di antaranya termasuk permintaan dari pihak Jepang agar organisasi seperti *Korean Council* tidak lagi menyuarakan isu *comfort women* di forum internasional, permintaan penghapusan terhadap patung-patung *Comfort Women*, serta permohonan agar istilah “perbudakan seksual” tidak lagi digunakan dalam narasi resmi terkait isu tersebut. Selain itu, satuan tugas juga mengkritik bahwa *Agreement on*

²³ Laurens, Jenny. *Analisis Kebijakan Comfort Women di Korea Selatan Pada Masa Kepemimpinan Moon Jae-in*. Diss. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, 2025.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Korea. *Report on the Review of the Korea–Japan Agreement of December 28, 2015 on the Issue of “Comfort Women” Victims*. 27 Dec. 2017, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Korea. https://www.mofa.go.kr/upload/cntnts/www/result_report_eng.pdf (Diakses pada 31 Juli 2025)

Comfort Women 2015 ini pada hakikatnya hanya sebuah perjanjian yang bersifat kesepakatan politik antar kedua negara, bukan perjanjian hukum formal yang memiliki kekuatan untuk mengikat secara yuridis.²⁶

Kebijakan lain yang diambil oleh Moon Jae-In ialah, menetapkan tanggal 14 Agustus sebagai Hari Peringatan Nasional untuk korban *Comfort Women*, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik akan penderitaan korban sekaligus memperkuat pengakuan sejarah secara resmi. Selain itu, dalam ranah internasional, Moon Jae-In aktif mengangkat isu ini di forum global seperti PBB, dengan menegaskan bahwa masalah *Comfort Women* merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harus mendapat perhatian dunia.²⁷

Dengan berbagai kebijakan Moon Jae-In yang terlihat lebih memihak korban dan mengkritik perjanjian 2015 dan pemerintah Jepang, hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Jepang mengalami ketegangan yang cukup signifikan. Kritik keras terhadap kesepakatan yang sebelumnya dianggap "*final dan tidak dapat diubah*" membuat pemerintah Jepang menilai bahwa pemerintah Korea Selatan tidak mematuhi kesepakatan dan komitmen yang telah dibuat antar kedua negara.

Ketegangan ini memuncak pada tahun 2017, ketika Jepang memutuskan untuk menarik Duta Besarnya dari Korea Selatan sebagai bentuk protes terhadap penempatan kembali patung *comfort women* atau "*statue of peace*" di Konsulat Jepang di Busan, Korea Selatan. Penarikan ini menunjukkan bahwa isu *comfort women* ini merupakan isu yang sensitif bagi kedua negara. Jepang memandang keberadaan patung-patung tersebut sebagai bagian dari pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah disetujui.²⁸

Ketegangan antara Korea Selatan dan Jepang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga berdampak dalam kerja sama bilateral, termasuk

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Remarks by President Moon Jae-in on National Day to Honor "Comfort Women" Victims.* Korea.net, 14 Aug. 2018, Government Briefing Room. <https://www.korea.net/Government/Briefing-Room/Presidential-Speeches/view?articleId=162296> (Diakses pada 31 Juli 2025)

²⁸ *Ibid.*

dalam bidang keamanan regional dan perdagangan.²⁹ Beberapa pertemuan bilateral tertunda, komunikasi antar pemimpin menjadi lebih terbatas, dan kerja sama strategis dalam menghadapi ancaman program nuklir Korea Utara pun sempat terganggu akibat memburuknya hubungan diplomatik tersebut.³⁰

Dampak lainnya yaitu hubungan keamanan antara kedua negara di tahun 2019 yaitu pada kerja sama *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) yaitu sebuah perjanjian berbagi informasi intelijen militer antara Korea Selatan dengan Jepang. Hubungan bilateral yang buruk antar kedua negara, sempat mengancam Korea Selatan keluar dari perjanjian tersebut. Meskipun akhirnya Korea Selatan menanggukkan keputusannya, namun insiden ini menunjukkan betapa berdampak kerja sama keamanan ketika isu sejarah tidak terselesaikan dengan baik.³¹

Meskipun pendekatan Moon Jae-In dinilai lebih empatik terhadap korban, beberapa pihak mengkritik kurangnya inisiatif alternatif yang dapat mengarah pada penyelesaian substansial. Setelah pembubaran yayasan, tidak banyak langkah lanjutan yang dilakukan untuk menciptakan wadah baru yang mengakomodasi kepentingan para penyintas secara formal dan sistematis. Meskipun tidak semua langkah berhasil mencapai hasil akhir yang konkret berbagai kebijakan pada pemerintahan Moon Jae-In menandai perubahan penting dalam peran negara terhadap isu *Comfort Women*.³²

2.1.3. PEMERINTAHAN YOON SUK-YEOL (2022-2025)

Pada masa pemerintahan Presiden Yoon Suk-Yeol, kebijakan pemerintah Korea Selatan terhadap isu *comfort women* cenderung

²⁹ Richardson, Lauren. "Japan's Deepening Diplomatic Crisis with South Korea." *East Asia Forum*, 15 Sept. 2019, <https://eastasiaforum.org/2019/09/15/japans-deepening-diplomatic-crisis-with-south-korea/> (Diakses pada 31 Juli 2025)

³⁰ Dumas, Loïc. *Japan–South Korea's Rivalry: The Semiconductor Industry Instrumentalization and Its Implication for the Future of Japan–South Korea Economic Interdependence*. *Asia Focus* no. 157, IRIS – Institut de Relations Internationales et Stratégiques, 11 Mar. 2021.

³¹ Pradana, Dewa Ayu Ardhana. "South Korea–Japan Bilateral Relationship Under Moon Jae-In Administration in 2017–2022." *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, vol. 3, no. 1, 2022, pp. 160–167. <https://ijersc.org/index.php/go/article/view/640/623>.

³² *Ibid.*

berfokus pada perbaikan hubungan bilateral dengan Jepang. Presiden Yoon Suk-Yeol yang berlatar belakang partai konservatif secara umum lebih menekankan pada kepentingan strategis dan kerja sama lintas sektor, serta berupaya meredam eskalasi konflik berlarut-larut terkait isu sejarah seperti *comfort women*.³³

Salah satu langkah yang dilakukan Presiden Yoon Suk-Yeol adalah dengan melakukan kunjungan resmi pada Maret 2023, hal ini menjadi kunjungan pemimpin Korea Selatan pertama dalam 12 tahun ke Jepang. Kunjungan ini dianggap sebagai salah satu langkah untuk memperbaiki hubungan kedua negara. Kunjungan tersebut berfokus pada upaya untuk melakukan kerja sama strategis dan keamanan serta penyelesaian sengketa masa lalu secara lebih pragmatis.³⁴

Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah Yoon bisa dipandang sebagai lanjutan dari tren diplomasi pragmatis yang mencoba menyelesaikan masalah bersejarah secara berimbang tanpa mengorbankan kepentingan politik dan keamanan nasional. Namun, kompleksitas isu *Comfort Women* yang menjadi simbol pelanggaran HAM masa lalu tetap menjadi tantangan utama dalam merumuskan kebijakan yang memuaskan semua pihak.³⁵

Kebijakan *Comfort Women* di masa pemerintahan Yoon Suk-Yeol cenderung mengedepankan diplomasi dan perbaikan hubungan Korea Selatan-Jepang dengan menekankan kepentingan strategis jangka panjang serta stabilitas kawasan. Meskipun demikian, isu hak-hak korban dan keadilan masih menjadi tuntutan kuat yang harus diakomodasi di dalam negeri, sehingga kebijakan Presiden Yoon harus

³³ Khasanah. "Presiden Yoon Sambut Awal Baru Hubungan Korea dan Jepang" *Korea.net Indonesian*, 16 Mar. 2025, <https://indonesian.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=230143> (Diakses pada 1 Agustus 2025)

³⁴ Smith, Josh. "S.Korea's Yoon to Visit Japan for Summit, First Such Trip in 12 Years." *Reuters*, 9 Mar. 2023, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/skoreas-yoon-visit-japan-first-such-trip-12-years-2023-03-09/> (Diakses pada 1 Agustus 2025)

³⁵ "South Korea pres. hopes to move forward with Japan, not focus on past." *Kyodo News*, 15 Mar. 2023 <https://english.kyodonews.net/articles/-/39478> (Diakses pada 1 Agustus 2025)

terus menyesuaikan antara kepentingan domestik dan tekanan diplomatik.³⁶

2.2. Role Conception

Role Conception merujuk pada persepsi internal suatu negara mengenai peran yang seharusnya negara lakukan dalam sistem internasional. Persepsi ini tidak hanya dibentuk oleh elit atau pengambil kebijakan negara, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika domestik, termasuk opini publik, tekanan dari masyarakat sipil, suara para korban, dan narasi yang berkembang di media serta organisasi non-pemerintah. Dalam konteks Korea Selatan, konstruksi peran nasional sangat erat kaitannya dengan memori kolektif tentang masa kolonial Jepang dan pengalaman historis sebagai korban pelanggaran HAM, termasuk dalam isu *comfort women*.

Persepsi internal ini menjadi landasan dalam menentukan sikap luar negeri. Ketika masyarakat, korban, dan organisasi sipil mengekspresikan ketidakpuasan terhadap cara Jepang menangani isu *comfort women*, tekanan tersebut membentuk ekspektasi terhadap pemerintah untuk merespons secara tegas. Oleh karena itu, peran Korea Selatan sebagai pembela keadilan historis dan pelindung martabat korban bukan hanya hasil dari strategi elite, tetapi juga refleksi dari tekanan domestik yang kuat.

2.2.1. OPINI PUBLIK KOREA SELATAN

Opini publik di Korea Selatan memainkan peran penting dalam membentuk bagaimana pemerintah memaknai posisi nasional dan mengambil kebijakannya terhadap isu *comfort women*. Dalam konteks ini, mayoritas publik melihat *comfort women* tidak hanya sebagai persoalan diplomatik, tetapi juga simbol trauma kolonial Jepang yang perlu diakui secara moral dan historis.

Survei yang dilakukan oleh Realmeter pada Desember 2015 mengungkapkan bahwa 50,7% responden menolak Kesepakatan 2015,

³⁶ *Ibid.*

sementara 43,2% mendukungnya dan 6,1% tidak yakin. Kelompok usia muda (20-49 tahun) cenderung menolak secara mayoritas, sedangkan usia 50 ke atas lebih banyak mendukung.³⁷ Selain itu, terdapat survei yang dilakukan oleh Gallup Korea pada awal 2016, yang menunjukkan bahwa 56% masyarakat Korea Selatan meminta agar kesepakatan dinegosiasikan kembali, karena dianggap terlalu negosiatif dan tidak mencerminkan tuntutan serta ingatan historis rakyat.³⁸

Mayoritas responden dari kedua tahun sepakat bahwa penyelesaian sengketa teritorial atas Takeshima/Dokdo adalah prioritas utama (53.7% pada 2019 dan 54.7% pada 2018). Ini diikuti oleh penyelesaian sengketa sejarah, seperti isu *comfort women* dan tenaga kerja paksa, yang mendapatkan perhatian sebesar 41.3% pada 2019 dan 38.7% pada 2018. Isu persepsi sejarah dan pendidikan juga dipandang penting, dengan peningkatan dari 28.7% pada 2018 menjadi 39.8% pada 2019, menunjukkan meningkatnya kekhawatiran atas narasi sejarah di kedua negara.³⁹

Dinamika opini publik di Jepang dan Korea Selatan menunjukkan bahwa persepsi masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap arah hubungan bilateral, khususnya terkait isu *comfort women*. Di Korea Selatan, isu ini dipandang sebagai simbol trauma kolonial yang menuntut pengakuan moral dan historis. Ketidakpuasan terhadap Kesepakatan 2015 dan dukungan terhadap renegosiasi mencerminkan harapan publik akan penyelesaian yang lebih bermartabat dan berpihak pada korban.

Sementara itu, masyarakat Jepang menempatkan isu teritorial sebagai prioritas utama, meskipun penyelesaian sengketa sejarah tetap dianggap penting. Perbedaan fokus ini menunjukkan tantangan dalam membangun pemahaman bersama. Dengan demikian, opini publik menjadi elemen krusial

³⁷ The Korea Times. "South Koreans Mixed on 'Comfort Woman' Deal: Poll." *The Korea Times*, 31 Dec. 2015, <https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/20151231/south-koreans-mixed-on-comfort-woman-deal-poll>. (Diakses pada 1 Agustus 2025)

³⁸ Kimura, Kan. "How can we face the past seriously? A Comment on the 'Comfort Women' Agreement." *E-International Relations*, 21 Jan. 2016. *E-International Relations*, diterbitkan online di e-ir.info pada 21 Januari 2016.

³⁹ *Ibid.*

yang tidak hanya mencerminkan sikap terhadap masa lalu, tetapi juga memengaruhi arah kebijakan dan hubungan diplomatik ke depan.⁴⁰

2.2.1.1. *Wednesday Demonstration*

Unjuk rasa Rabu atau *Wednesday Demonstration* adalah bentuk protes mingguan yang telah berlangsung sejak 8 Januari 1992 di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul. Aksi ini diselenggarakan oleh *Korean Council for Justice and Remembrance for the Issues of Military Sexual Slavery by Japan*. Demonstrasi ini menjadi simbol keteguhan masyarakat sipil Korea Selatan dalam menuntut keadilan bagi para korban *comfort women*. Melalui aksi ini, publik menyuarakan penolakan terhadap penyelesaian sepihak dan menuntut pengakuan serta permintaan maaf resmi dari pemerintah Jepang.⁴¹

Setiap minggunya, masyarakat dari berbagai latar belakang seperti mahasiswa, aktivis, warga lanjut usia, bahkan wisatawan asing ikut bergabung dalam aksi ini. Demonstrasi ini juga dihadiri oleh korban secara langsung yang menyampaikan kesaksian mereka secara terbuka menjadi elemen paling kuat dalam menggugah kesadaran publik. Demonstrasi ini pun tidak hanya menjadi ruang advokasi, tetapi juga forum pendidikan dan solidaritas antargenerasi. Aksi ini menyampaikan pesan bahwa keadilan bagi korban kekerasan seksual masa perang bukan sekadar persoalan sejarah, melainkan isu hak asasi manusia yang relevan hingga kini.⁴²

Wednesday Demonstration juga mencerminkan kuatnya dukungan publik terhadap perjuangan para korban. Meskipun jumlah *comfort women* yang masih hidup terus berkurang, partisipasi masyarakat tidak surut. Hal ini menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat Korea Selatan. Aksi ini memperlihatkan bahwa penyelesaian masalah *comfort women* tidak

⁴⁰ Genron NPO. "The 5th Japan-South Korea Joint Public Opinion Poll (2017) Analysis Report on Comparative Data." *Genron NPO*, 20 Jul. 2017, https://www.genron-npo.net/en/opinion_polls/archives/5363.html (Diakses pada 1 Agustus 2025)

⁴¹ Lee, Jaeyeon. "The ethno-nationalist solidarity and (dis) comfort in the Wednesday Demonstration in South Korea." *Gender, Place & Culture* 30.4 (2023): 528-541.

⁴² *Ibid.*

bisa dilakukan tanpa mempertimbangkan suara korban dan aspirasi publik.⁴³

Selain sebagai bentuk protes, *Wednesday Demonstration* juga memiliki dimensi simbolik yang kuat. Keberadaan *Statue of Peace* yang dipasang di depan Kedutaan Besar Jepang menjadi lambang penderitaan korban sekaligus perlawanan terhadap pelupaan sejarah. Patung tersebut sering dihiasi bunga, pakaian tradisional, atau karya seni oleh para peserta unjuk rasa. Representasi visual ini memperkuat pesan moral yang ingin disampaikan: bahwa penderitaan korban tidak boleh diabaikan atau dikompromikan demi kepentingan politik.⁴⁴

2.2.2. PERSEPSI KORBAN COMFORT WOMEN

Persepsi para korban *comfort women* memainkan peran yang sangat penting dalam memahami dinamika penyelesaian isu ini. Bagi sebagian besar korban yang masih hidup, penyelesaian diplomatik yang tidak melibatkan mereka secara langsung dianggap tidak sah. Kesepakatan 2015 antara Jepang dan Korea Selatan, ditolak oleh banyak korban karena tidak didasarkan pada konsultasi atau persetujuan mereka. Para korban merasa bahwa perjanjian tersebut lebih mengutamakan kepentingan diplomatik ketimbang keadilan substantif.⁴⁵

Salah satu organisasi paling vokal dalam menyuarakan suara para korban adalah *Korean Council for Justice and Remembrance*. Organisasi ini secara konsisten menolak Kesepakatan 2015 dan menuntut agar pemerintah Jepang memberikan permintaan maaf resmi, mengakui kejahatan perang secara terbuka, dan menyediakan kompensasi langsung kepada para korban. Mereka juga menyatakan bahwa dana yang disalurkan melalui yayasan hasil

⁴³ Choi, Jin. "Paving the Road to Peace: Transnational Solidarity for Survivors of Military Sexual Slavery by Imperial Japan through the Observation of the Wednesday Demonstration." (2019).

⁴⁴ Shim, David. "Memorials' politics: Exploring the material rhetoric of the Statue of Peace." *Memory Studies* 16.4 (2023): 663-676.

⁴⁵ *Ibid.*

dari kesepakatan tersebut tidak dapat menggantikan keadilan yang seharusnya diterima korban.⁴⁶

Penolakan terhadap kesepakatan ini juga dipicu oleh pernyataan Pemerintah Jepang yang tidak konsisten. Meskipun dalam perjanjian disebutkan adanya “permintaan maaf tulus” dari Perdana Menteri Jepang saat itu, banyak korban menilai bahwa pernyataan tersebut tidak disampaikan secara langsung dan tidak mencerminkan pengakuan tanggung jawab negara. Selain itu, beberapa pejabat Jepang secara terbuka menyatakan bahwa Jepang tidak akan lagi mengakui tanggung jawab hukum atas isu tersebut, yang semakin menyakiti para korban dan memperkuat persepsi bahwa kesepakatan itu hanya bersifat simbolis.⁴⁷

2.3. Role Prescription

Dalam *National Role Conception (NRC)*, “*National role conceptions are related to, or buttressed by, the role prescriptions coming from the external environment*”⁴⁸ Role Prescription merujuk pada harapan-harapan eksternal yang diarahkan kepada suatu negara mengenai bagaimana seharusnya negara tersebut bertindak dalam sistem internasional. Dalam konteks isu *comfort women*, Korea Selatan menghadapi berbagai preskripsi peran dari lingkungan eksternal, termasuk dari masyarakat internasional yang menuntut penyelesaian berkeadilan atas pelanggaran masa lalu yang dilakukan oleh Jepang.⁴⁹

Preskripsi peran terhadap Korea Selatan pada isu ini mencerminkan ekspektasi bahwa negara tersebut harus bertindak sebagai advokat keadilan historis dan pelindung hak-hak korban. Lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan Komite HAM menaruh perhatian terhadap bagaimana Korea Selatan menyuarakan kepentingan korban, baik dalam diplomasi bilateral

⁴⁶ Carranza Ko, Nusta. "South Korea's collective memory of past human rights abuses." *Memory Studies* 13.6 (2020): 1113-1128.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

maupun di forum internasional. Di sisi lain, terdapat aktor negara yang menjadi faktor eksternal *Role Prescription* seperti Jepang dan Amerika Serikat.⁵⁰

2.3.1.TUNTUTAN DARI JEPANG

Setelah penandatanganan *Comfort Women Agreement* pada 28 Desember 2015, Jepang secara eksplisit mengharapkan bahwa Korea Selatan tidak akan lagi mengangkat isu ini di forum internasional maupun dalam hubungan bilateral. Pernyataan ini bahkan tercantum dalam dokumen kesepakatan yang menyebut bahwa isu tersebut "*finally and irreversibly*". Korea Selatan harus memainkan peran sebagai menghormati kesepakatan dan tidak mengganggu hubungan diplomatik melalui narasi sejarah.

Namun, ketika pada tahun 2017-2019 pemerintahan Presiden Moon Jae-in membubarkan Yayasan *Reconciliation and Healing Foundation* dan menyatakan bahwa perjanjian tidak mencerminkan suara para korban, Jepang menganggap Korea Selatan melanggar komitmen bilateral. Jepang menginginkan Korea Selatan tetap berpegang pada isi perjanjian yang telah disepakati, tanpa terpengaruh oleh pergantian pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa Jepang mengharapkan Korea Selatan menjalankan peran yang konsisten dan stabil sebagai mitra dalam hubungan diplomatik.

Tanggapan Jepang terhadap putusan pengadilan Korea Selatan pada tahun 2021, 2023, dan 2025 yang memerintahkan pemerintah Jepang membayar kompensasi kepada para korban semakin memperjelas preskripsi tersebut.⁵¹ Jepang mengecam keputusan tersebut dan mengklaim bahwa Korea Selatan melanggar prinsip hukum internasional

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Ministry of Foreign Affairs of Japan. "Regarding the Judgement of the Cheongju District Court of the Republic of Korea in the Lawsuit Filed by a Bereaved Family of a Former Comfort Woman." *MOFA Japan*, 25 Apr. 2025, www.mofa.go.jp/press/release/pressite_000001_01212.html. (Diakses pada 2Agustus 2025)

seperti *sovereign immunity*.⁵² Ini mencerminkan bahwa Jepang ingin Korea Selatan mengambil peran sebagai negara yang menghormati stabilitas hukum internasional dan menyelesaikan sengketa secara tertutup, bukan melalui pengadilan domestik atau opini publik internasional.⁵³

Selain tekanan hukum, Jepang juga memberikan tekanan diplomatik simbolis, seperti protes terhadap pendirian patung *comfort women* di depan Konsulat Jepang di Busan. Dalam hal ini, Jepang secara tidak langsung mempreskripsikan bahwa Korea Selatan sebaiknya mengontrol wacana masyarakat sipil dan mencegah tindakan-tindakan simbolik yang mempermalukan Jepang secara internasional.⁵⁴

Dalam kerangka *National Role Conception (NRC)*, tuntutan dari Jepang selama periode ini mendorong Korea Selatan untuk menyesuaikan peran nasionalnya agar selaras dengan tujuan rekonsiliasi diplomatik dan menghindari konfrontasi terbuka. Namun, karena tuntutan ini bertolak belakang dengan tekanan dari dalam negeri serta desakan para korban untuk mendapatkan keadilan, Korea Selatan menghadapi hambatan dalam mengadopsi sepenuhnya peran yang dipreskripsikan tersebut.⁵⁵

2.3.2. TUNTUTAN DARI AMERIKA SERIKAT

Amerika Serikat secara konsisten menuntut dan mengharapkan penyelesaian isu *comfort women* antara Korea Selatan dan Jepang, dengan mempertimbangkan dampak besar dari adanya isu ini terhadap stabilitas kawasan Asia Timur dan kerja sama trilateral antara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Pada tahun 2015, di bawah dorongan

⁵² Nam, Seung-hyun. *Sovereign Immunity in the Comfort Women Case and Its Application in Korean Courts*. IFANS Perspectives, no. 2022-04E, Institute of Foreign Affairs and National Security (IFANS), Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea, Feb. 2022.

⁵³ Liakopoulos, Dimitris. "State Immunity and Inter-State Negotiations on Korean Comfort Women." *Indonesian Journal of International Law*, vol. 19, no. 4, 2022, pp. -. Center of European and International Justice, Universitas Indonesia Digital Commons.

⁵⁴ Choe, S., & Rich, M. (2017, January 6). *Japan recalls ambassador to South Korea to protest 'comfort woman' statue*. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2017/01/06/world/asia/japan-south-korea-ambassador-comfort-woman-statue.html> (Diakses pada 2 Agustus 2025)

⁵⁵ *Ibid.*

diplomatik dari Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang sepakat pada sebuah perjanjian yang menyatakan masalah *comfort women* telah terselesaikan secara “final dan tidak dapat dibatalkan.”

Pemerintah Amerika Serikat secara terbuka menyambut baik dan mendukung perjanjian tahun 2015, karena mereka memandang langkah tersebut sebagai jalan untuk memperkuat hubungan kedua sekutunya guna menghadapi tantangan regional, terutama ancaman Korea Utara. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh John Kerry (Menteri Luar Negeri AS pada tahun 2015) “*We believe this agreement will promote healing and help to improve relations between two of the United States’ most important allies.*”⁵⁶ Meskipun pada akhirnya, perjanjian ini menimbulkan banyak kritik dan ketidakpuasan dari para korban dan publik Korea Selatan.

Bagi Amerika, penyelesaian isu *comfort women* bukan sekadar soal moral dan Hak Asasi Manusia, tetapi juga memiliki kepentingan strategis. Hubungan Korea Selatan dan Jepang yang harmonis dianggap penting untuk memperkuat kerja sama keamanan melawan ancaman Korea Utara serta menahan ekspansi pengaruh Tiongkok di Asia Timur. Ketegangan yang berkepanjangan dinilai dapat mengganggu efektivitas aliansi militer trilateral dan menghambat koordinasi dalam isu pertahanan dan kebijakan kawasan.⁵⁷

Amerika Serikat sendiri beberapa kali menekan Jepang agar mengambil tanggung jawab penuh atas sejarah kelam ini. Pemerintah Amerika berulang kali mengingatkan pentingnya pendekatan yang lebih berfokus pada korban, sebuah prinsip yang juga didorong oleh PBB agar rekonsiliasi benar-benar berkelanjutan dan tidak menyisakan luka lama.⁵⁸

⁵⁶ Kerry, John. “Resolution of the Comfort Women Issue.” *Press Statement*, U.S. Department of State, 28 Dec. 2015. <https://2009-2017.state.gov/secretary/remarks/2015/12/250874.htm> (Diakses pada 2 Agustus 2025)

⁵⁷ 이은영. *The Role of the United States in the Comfort Women Controversy between South Korea and Japan*. Diss. 서울대학교 국제대학원, 2015.

⁵⁸ *Ibid.*

Dengan demikian, sikap dan upaya Amerika Serikat dalam penyelesaian isu *comfort women* berorientasi pada dua tujuan utama yaitu rekonsiliasi Hak Asasi Manusia terhadap korban serta stabilitas geopolitik di kawasan Asia Timur. Meski sudah ada berbagai upaya, hingga kini tuntutan AS agar isu ini benar-benar terselesaikan melalui rekonsiliasi yang adil masih terus menjadi agenda penting dalam kerangka diplomasi dan keamanan regional.⁵⁹

2.4. Position

Position merujuk pada persepsi atau penempatan suatu negara dalam struktur internasional. Hal ini menyangkut bagaimana suatu negara melihat dirinya sendiri dan bagaimana negara tersebut dipandang oleh aktor-aktor lain dalam sistem internasional. *Position* mencerminkan status, kekuatan relatif, serta pengaruh politik dan ekonomi suatu negara di panggung global atau regional. Dengan kata lain, *position* merupakan kerangka struktural yang menentukan sejauh mana suatu negara memiliki keleluasaan dalam menjalankan berbagai peran di kancah internasional.⁶⁰

Korea Selatan dalam isu *comfort women* mengalami dilema dalam membuat kebijakan negaranya, hal ini disebabkan oleh adanya ketegangan antara tekanan internal dan tuntutan eksternal. Secara internal, pemerintah Korea Selatan menghadapi tekanan kuat dari publik, korban, serta kelompok masyarakat sipil yang menuntut pengakuan, permintaan maaf resmi, dan kompensasi yang bermartabat dari Jepang. Oleh karena itu, setiap perjanjian yang dinilai tidak merepresentasikan kepentingan korban seperti perjanjian 2015 cenderung memicu ketidakpuasan dan protes dari pihak internal.⁶¹

Di sisi lain, secara eksternal, Korea Selatan diharapkan oleh Jepang dan Amerika Serikat untuk memainkan peran sebagai mitra strategis yang stabil dan kooperatif di kawasan Asia Timur. Tuntutan eksternal ini sering kali menekankan pentingnya rekonsiliasi, kerja sama trilateral, dan

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

penyelesaian isu *comfort women* demi stabilitas regional. Hal ini menempatkan Korea Selatan dalam posisi yang sulit terlalu menekankan kepentingan domestik berisiko mengganggu hubungan diplomatik, sementara mengabaikan suara publik dan korban akan menciptakan delegitimasi internal terhadap pemerintah.⁶²

Dilema posisi Korea Selatan dalam isu ini juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah kolonialisme yang membentuk identitas nasionalnya. Sebagai negara yang pernah dijajah oleh Jepang selama lebih dari tiga dekade, Korea Selatan membawa luka historis yang masih hidup dalam memori kolektif masyarakat. Isu *comfort women* bukan hanya persoalan hubungan diplomatik antara dua negara, tetapi menyentuh dimensi simbolik dan emosional yang dalam bagi warga Korea Selatan.

3. KESIMPULAN

Kebijakan Jepang dalam menangani isu *comfort women*, khususnya melalui Perjanjian 2015, memicu berbagai respon dari Korea Selatan yang dipengaruhi oleh dinamika politik domestik, memori historis, dan identitas nasional sebagai negara korban kolonialisme. Perjanjian yang dianggap final dan tidak dapat diubah tersebut ternyata tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat maupun korban, karena tidak melibatkan mereka secara langsung dalam proses negosiasi.

Respon pemerintah Korea Selatan terhadap kebijakan Jepang mengalami perubahan sepanjang tiga periode pemerintahan. Park Geun-Hye menandatangani perjanjian 2015 demi stabilitas hubungan diplomatik, namun menuai kritik domestik. Moon Jae-In membubarkan yayasan hasil perjanjian tersebut dan menilai perjanjian tidak sah secara moral. Yoon Suk-Yeol berupaya menormalisasi hubungan dengan Jepang, namun kembali menuai resistensi dari publik karena dianggap mengabaikan keadilan historis.

⁶² *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, I. K. (2022). "Comfort Women" Korea Selatan, karakter yang terlupakan. *PRIMARY*, 1(2), 101–123.
- Carranza Ko, Ñ. (2020). South Korea's collective memory of past human rights abuses. *Memory Studies*, 13(6), 1113–1128.
- Chariska, A. E. (2024). Dampak penyelesaian isu comfort women terhadap diplomasi Jepang dan Korea Selatan. *Global Insights Journal*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.36859/gij.v2i1.2718>
- Choe, S., & Rich, M. (2017, January 6). Japan recalls ambassador to South Korea to protest 'comfort woman' statue. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2017/01/06/world/asia/japan-south-korea-ambassador-comfort-woman-statue.html>
- Choi, J. (2019). Paving the road to peace: Transnational solidarity for survivors of military sexual slavery by Imperial Japan through the observation of the Wednesday demonstration.
- Choi, K. (2025, April 25). Comfort woman's family wins suit against Japan in S. Korea. *Yonhap News Agency*. <https://en.yna.co.kr/view/AEN20250425011800320>
- Dumas, L. (2021, March 11). *Japan–South Korea's rivalry: The semiconductor industry instrumentalization and its implication for the future of Japan–South Korea economic interdependence*. Asia Focus No. 157, IRIS – Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
- Fauzia, R., & Pakpahan, S. (2017). *Diplomasi Korea Selatan mendesak Jepang menandatangani Agreement on Comfort Women tahun 2011–2015* (Disertasi). Universitas Riau.
- Genron NPO. (2017, July 20). *The 5th Japan South Korea joint public opinion poll (2017) analysis report on comparative data*. https://www.genron-npo.net/en/opinion_polls/archives/5363.html
- Genron NPO. (2019, June 12). *The Japan South Korea joint public opinion poll 2019*. https://genron-npo.net/en/opinion_polls/archives/5489.html
- Ibrahim, M. P. P., & Rezasyah, T. (2021). Advokasi dan negosiasi: Diplomasi hak asasi manusia Republik Korea pada masa Park Geun-hye mengenai comfort women. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3(2), 170–185.
- Kerry, J. (2015, December 28). Resolution of the comfort women issue. *U.S. Department of State*. <https://2009-2017.state.gov/secretary/remarks/2015/12/250874.htm>
- Khasanah. (2025, August 1). Presiden Yoon sambut awal baru hubungan Korea dan Jepang. *Korea.net Indonesian*. <https://indonesian.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=230143>

- Kimura, K. (2016, January 21). How can we face the past seriously? A comment on the 'comfort women' agreement. *E-International Relations*. <https://www.e-ir.info/2016/01/21/how-can-we-face-the-past-seriously-a-comment-on-the-comfort-women-agreement/>
- Kristi, R. (2016). Perbedaan respon Indonesia dan Korea Selatan dalam penyelesaian gugatan terhadap Jepang. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 5(2), 323–332.
- Lalitya, G. K., & Wahyudi, F. E. (2020). Analisis sikap yang diambil oleh pemerintah Korea Selatan pada masa Presiden Park Geun Hye terkait dengan isu comfort. *Journal of International Relations Diponegoro*, 6(4), 639–648.
- Laurens, J. (2025). *Analisis kebijakan comfort women di Korea Selatan pada masa kepemimpinan Moon Jae-in* (Disertasi). Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
- Lee, J. (2023). The ethno-nationalist solidarity and (dis) comfort in the Wednesday demonstration in South Korea. *Gender, Place & Culture*, 30(4), 528–541.
- Lee, K. M., & Kim, M. (2019, August 14). Thousands attend 1,400th weekly Seoul protest for comfort women. *Korea.net*. <https://www.korea.net/NewsFocus/Society/view?articleId=174159>
- Liakopoulos, D. (2022). State immunity and inter-state negotiations on Korean comfort women. *Indonesian Journal of International Law*, 19(4).
- Mingzhe, X. (2017). "Comfort women": Historical agony and practical tasks. *통일인문학*, 3(1), 15–30.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2025, April 25). Regarding the judgement of the Cheongju District Court of the Republic of Korea in the lawsuit filed by a bereaved family of a former comfort woman. *MOFA Japan*. www.mofa.go.jp/press/release/pressite_000001_01212.html
- Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Korea. (2017, December 27). *Report on the review of the Korea–Japan agreement of December 28, 2015 on the issue of “comfort women” victims*. https://www.mofa.go.kr/upload/cntnts/www/result_report_eng.pdf
- Nam, S. H. (2022, February). Sovereign immunity in the comfort women case and its application in Korean courts. *IFANS Perspectives*, 2022(04E). Institute of Foreign Affairs and National Security (IFANS), Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea.
- Nuyen, S. (2021, January 8). South Korean court orders Japan to compensate 12 WWII sex slaves. *NPR*. <https://www.npr.org/2021/01/08/954790836/south-korean-court-orders-japan-to-compensate-12-wwii-sex-slaves>
- Pradana, D. A. A. (2022). South Korea–Japan bilateral relationship under Moon Jae-In administration in 2017–2022. *International Journal of*

- Educational Research & Social Sciences*, 3(1), 160–167.
<https://ijersc.org/index.php/go/article/view/640/623>
- RASENDRIYA, R. R. (n.d.). *Kebijakan luar negeri Korea Selatan pada masa pemerintahan Presiden Moon Jae In terhadap Jepang dalam kasus comfort women* (Skripsi).
- Richardson, L. (2019, September 15). Japan's deepening diplomatic crisis with South Korea. *East Asia Forum*.
<https://eastasiaforum.org/2019/09/15/japans-deepening-diplomatic-crisis-with-south-korea/>
- Sari, C. A. P., et al. (2022). Factors affecting Japan in resolving the issue of jugun ianfu with South Korea through a 'finally and irreversibly' agreement between Japan and South Korea in 2016. *Strategi Perang Semesta*, 8(1), 57–68.
- Shim, D. (2023). Memorials' politics: Exploring the material rhetoric of the Statue of Peace. *Memory Studies*, 16(4), 663–676.
- Shin, H. (2023, November 23). South Korea court orders Japan to compensate 'comfort women', reverses earlier ruling. *Reuters*.
<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-korea-court-orders-japan-compensate-comfort-women-reverses-earlier-ruling-2023-11-23/>
- Smith, J. (2023, March 9). S. Korea's Yoon to visit Japan for summit, first such trip in 12 years. *Reuters*. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/skoreas-yoon-visit-japan-first-such-trip-12-years-2023-03-09/>
- Snyder, S. (2016). South Korean identity under Park Geun-hye: Crosscurrents & choppy waters. *Joint US Korea Academic Studies*, 103–112.
- The Hankyoreh. (2025, February 28). Attacks on 'comfort women' heralded the violent far right seen today in Korea, advocate says.
https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/1184826.html
- The Korea Times. (2015, December 31). South Koreans mixed on 'comfort woman' deal: Poll.
<https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/20151231/south-koreans-mixed-on-comfort-woman-deal-poll>
- 이은영. (2015). *The role of the United States in the comfort women controversy between South Korea and Japan* (Disertasi). 서울대학교 국제대학원.